

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH (MBS) SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN
KINERJA MADRASAH DI ERA PENDIDIKAN MODERN**

Hadrian Nur¹, Sardimi², Asmawati³

^{1,2}Pascasarjana UIN Palangka Raya

¹hadriannur2510130469@uin-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

School-Based Management (SBM) plays a crucial role in enhancing the effectiveness of madrasah governance and performance. However, in practice, community involvement is often limited to administrative and financial support, and thus has not yet fully functioned as a strategic force in the development of educational institutions. This study aims to analyze the concept of community participation in the implementation of SBM, identify its forms and roles in madrasah management, examine its contribution to improving madrasah performance in the era of modern education, and identify the factors that support and hinder community participation. The study employs a qualitative approach using library research, drawing from scientific journal articles, academic books, educational policy documents, and relevant prior research findings. Data were analyzed using content analysis techniques through the processes of identification, selection, categorization, interpretation, and synthesis of information. The study findings indicate that community participation in the implementation of MBS is realized through involvement in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of educational programs, as well as by fulfilling the roles of advisory agency, supporting agency, controlling agency, and mediating agency. Such participation contributes to improved madrasah performance through strengthened governance, increased transparency and accountability, the development of innovation, expanded resource support, and enhanced public trust. Factors supporting community participation include participatory leadership, effective communication, community awareness of the importance of education, a culture of mutual cooperation, and the active role of the madrasah committee, while inhibiting factors include the community's limited understanding of MBS, economic constraints, weak coordination, and the suboptimal functioning of the madrasah committee. The novelty of this research lies in the perspective that positions community participation as a catalyst for improving madrasah performance, rather than merely a supporting element for MBS implementation; thus, strengthening the partnership between madrasahs and the community becomes a crucial strategy in realizing effective, adaptive, and quality-oriented educational governance in the era of modern education.

Keywords: *community participation, madrasah performance, modern education, school based management (sbm)*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola dan kinerja madrasah. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat masih sering terbatas pada dukungan administratif dan finansial sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai kekuatan strategis dalam pengembangan lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS, mengidentifikasi bentuk dan perannya dalam pengelolaan madrasah, mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan kinerja madrasah di era pendidikan modern, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui proses identifikasi, seleksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta menjalankan fungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*mediating agency*). Partisipasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja madrasah melalui penguatan tata kelola, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan inovasi, perluasan dukungan sumber daya, serta peningkatan kepercayaan publik. Faktor pendukung partisipasi masyarakat meliputi kepemimpinan yang partisipatif, komunikasi yang efektif, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, budaya gotong royong, dan peran aktif komite madrasah, sedangkan faktor penghambatnya mencakup rendahnya pemahaman masyarakat tentang MBS, keterbatasan ekonomi, lemahnya koordinasi, dan belum optimalnya fungsi komite madrasah. Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai katalisator peningkatan kinerja madrasah, bukan sekadar unsur pendukung implementasi MBS, sehingga penguatan kemitraan antara madrasah dan masyarakat menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu di era pendidikan modern.

Kata kunci: kinerja madrasah, manajemen berbasis sekolah, mbs, partisipasi masyarakat, pendidikan modern

A. Pendahuluan

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika globalisasi, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Perubahan sosial yang berlangsung cepat menuntut madrasah untuk tidak hanya berfungsi sebagai institusi transmisi nilai-nilai keislaman, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, adaptif, dan berkarakter. Dalam konteks tersebut, peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengelolaan lembaga yang efektif, transparan, dan partisipatif (Machali et al., n.d.).

Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep MBS memberikan kewenangan yang lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengelola sumber daya, merumuskan program, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan setempat. Melalui desentralisasi pengelolaan

pendidikan, sekolah atau madrasah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara mandiri tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik (Langeningtias et al., 2021). Dalam implementasinya, MBS dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu kemandirian, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Aziz, 2015).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam keberhasilan implementasi MBS. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dukungan finansial, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran, pengawasan, konsultasi, serta keterlibatan dalam proses perencanaan dan evaluasi program Pendidikan (Aziz, 2015).

Kehadiran masyarakat dalam pengelolaan madrasah dapat memungkinkan terciptanya sinergi antara kebutuhan pendidikan dengan harapan pemangku kepentingan sehingga program yang dijalankan menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan sekitar (Khoiroh et al., 2025). Dalam perspektif pendidikan Islam, partisipasi masyarakat mencerminkan nilai musyawarah dan tanggung jawab

bersama dalam membangun kualitas pendidikan umat (Khoiroh et al., 2025). Secara normatif, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pendidikan.

Kebijakan ini diperkuat melalui keberadaan komite sekolah atau komite madrasah sebagai wadah representatif masyarakat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBS pada madrasah tidak dapat dilepaskan dari efektivitas peran masyarakat dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan program pendidikan (Nurokhim, 2017). Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS pada madrasah masih menghadapi sejumlah kendala. Peran komite madrasah di banyak lembaga pendidikan sering kali terbatas pada fungsi administratif dan penggalangan dana, sementara

keterlibatan dalam perencanaan strategis, pengawasan mutu, dan evaluasi program masih relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan prinsip partisipatif yang menjadi ruh MBS belum sepenuhnya terwujud sehingga dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan belum optimal (Handoyo et al., 2021). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan juga menjadi faktor yang menghambat terciptanya kemitraan yang produktif antara madrasah dan Masyarakat (Handoyo et al., 2021). Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa madrasah yang mampu membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan masyarakat cenderung memiliki tingkat efektivitas organisasi yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat sangat berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, penguatan akuntabilitas kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan (Fattah, 2019). Keterlibatan masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap

madrasah sehingga berdampak pada meningkatnya dukungan sosial dan keberlanjutan program-program pendidikan (Machali et al., n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS pada madrasah menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat partisipasi tersebut. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan implementasi MBS guna mewujudkan tata kelola madrasah yang lebih efektif, demokratis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: 1) Bagaimana konsep partisipasi masyarakat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada madrasah? 2) Bagaimana bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi MBS di madrasah? 3) Bagaimana kontribusi partisipasi masyarakat sebagai katalisator dalam meningkatkan

kinerja madrasah di era pendidikan modern? 4) Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS pada madrasah? 5) Apa nilai kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS, mengidentifikasi bentuk dan peran keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah, menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja madrasah, serta mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam konteks pendidikan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja madrasah. Studi kepustakaan

memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan sehingga mampu menghasilkan sintesis konseptual yang sistematis (Haramain, n.d.).

Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional yang membahas partisipasi masyarakat, MBS, tata kelola pendidikan, komite madrasah, dan kinerja madrasah. Adapun sumber sekunder meliputi buku akademik, prosiding, dokumen kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai referensi dari basis data akademik seperti Google Scholar dan repositori perguruan tinggi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan publikasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) melalui tahapan identifikasi, seleksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis data dari berbagai sumber yang telah

terkumpul. Untuk meningkatkan validitas hasil kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan perspektif teoritis yang berbeda. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif mengenai peran partisipasi masyarakat sebagai katalisator dalam implementasi MBS dan peningkatan kinerja madrasah di era pendidikan modern.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah

Hasil kajian literatur menunjukkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep ini lahir dari paradigma desentralisasi pendidikan yang menempatkan sekolah atau madrasah sebagai pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan komite madrasah. Dalam perspektif MBS, masyarakat tidak lagi

diposisikan sebagai objek yang hanya menerima layanan pendidikan, melainkan sebagai mitra strategis yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan MBS ditentukan kemampuan madrasah membangun kolaborasi efektif dengan masyarakat sebagai bagian dari tata kelola pendidikan yang partisipatif dan demokratis (Aziz, 2015).

Secara konseptual, partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Menurut berbagai kajian tentang MBS, partisipasi masyarakat tidak terbatas pada dukungan material atau finansial semata, tetapi juga mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, keahlian, pengawasan, dan advokasi terhadap pengembangan madrasah. Keterlibatan tersebut menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang disusun oleh madrasah selaras dengan kebutuhan, harapan, dan karakteristik masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memiliki dimensi yang luas, meliputi aspek

sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan (Aini, 2022). Dalam konteks madrasah, konsep partisipasi masyarakat memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen modern, tetapi juga berakar pada nilai-nilai pendidikan Islam. Prinsip musyawarah (*syura*), tanggung jawab bersama (*mas'uliyah*), kerja sama (*ta'awun*), dan kemitraan (*syirkah*) menjadi landasan normatif yang memperkuat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Madrasah pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga hubungan keduanya saling membutuhkan. Masyarakat sangat membutuhkan madrasah sebagai lembaga pembinaan generasi, sementara madrasah membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan (Zainuri, 2013).

Berdasarkan hasil sintesis literatur, partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan masyarakat melalui komite madrasah

dalam merumuskan visi, misi, program kerja, serta kebijakan strategis madrasah. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program, yang diwujudkan melalui dukungan sumber daya, baik berupa dana, tenaga, pemikiran, maupun jaringan kerja sama. Ketiga, partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja madrasah. Keempat, partisipasi pengembangan budaya mutu, yaitu kontribusi masyarakat dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, religius, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan (Muhadi et al., 2021).

Lebih lanjut, kajian literatur menunjukkan partisipasi masyarakat dalam MBS tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pendidikan, tetapi sebagai instrumen penguatan tata kelola madrasah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap meningkat transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas organisasi pendidikan. Madrasah mampu mengoptimalkan keterlibatan masyarakat cenderung memiliki

dukungan sosial yang lebih kuat, tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, serta kemampuan yang lebih baik mengembangkan program inovatif. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menyebabkan pengelolaan madrasah berjalan secara tertutup dan kurang responsif terhadap kebutuhan lingkungan (Analisa et al., 2024).

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial dalam implementasi MBS pada madrasah. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk dukungan eksternal, tetapi sebagai mekanisme kolaboratif yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan pendidikan. Dalam era pendidikan modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan, partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola madrasah yang efektif, adaptif, dan berdaya saing (Handoyo et al., 2021).

Bentuk dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi MBS di Madrasah

Hasil kajian berbagai literatur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di madrasah. Dalam paradigma MBS, masyarakat diposisikan sebagai mitra strategis yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena madrasah tidak dapat menjalankan fungsi pendidikannya secara optimal tanpa dukungan dari lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh sebab itu, implementasi MBS menuntut adanya hubungan yang sinergis antara madrasah, orang tua, komite madrasah, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Langeningtias et al., 2021).

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, partisipasi dalam perencanaan pendidikan. Pada

tahap ini, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan visi, misi, program kerja, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan madrasah. Keterlibatan tersebut umumnya dilakukan melalui forum rapat komite madrasah, musyawarah bersama orang tua peserta didik, maupun konsultasi dengan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan memungkinkan madrasah memperoleh masukan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga program yang dirancang menjadi lebih relevan dan kontekstual (Nurokhim, 2017).

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Bentuk partisipasi ini dapat diwujudkan melalui dukungan sumber daya berupa tenaga, pemikiran, keahlian, maupun bantuan finansial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan akademik maupun nonakademik mampu memperkuat efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan madrasah. Dukungan tersebut tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, tetapi juga memperluas jaringan kerja

sama yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan lembaga (Abdullah Husain, n.d.). Dalam konteks pendidikan modern, partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui kontribusi dalam pengembangan literasi digital, penguatan pendidikan karakter, dan penyediaan akses terhadap berbagai sumber belajar (Jemani, 2020).

Ketiga, partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi. Salah satu prinsip utama MBS akuntabilitas, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Peran ini dijalankan komite madrasah sebagai representasi masyarakat yang bertugas memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi terhadap kebijakan madrasah. Melalui fungsi pengawasan tersebut, masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, serta penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab (Aziz, 2015). Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi juga membantu madrasah mengidentifikasi kelemahan program serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan

(Salehoddin & Rony, 2022). Selain dalam bentuk-bentuk tersebut, kajian literatur menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang lebih luas dalam implementasi MBS. Pertama, masyarakat berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penyusunan kebijakan dan program madrasah. Kedua, masyarakat berperan sebagai pendukung (*supporting agency*) yang menyediakan dukungan moral, material, dan sosial bagi keberlangsungan pendidikan. Ketiga, masyarakat berperan sebagai pengontrol (*controlling agency*) yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keempat, masyarakat berperan sebagai mediator (*mediating agency*) yang menjembatani komunikasi antara madrasah dengan pemerintah maupun lingkungan sosial yang lebih luas (Magdalena, 2016).

Dalam perspektif pendidikan Islam, peran masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab bersama) yang menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam mengembangkan

pendidikan umat. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat hakikatnya memerlukan dukungan berbagai pihak agar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial secara optimal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menciptakan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan (Zainuri, 2013).

Penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap efektivitas implementasi MBS. Madrasah yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat cenderung memiliki tata kelola yang lebih transparan, tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, serta kemampuan yang lebih baik dalam mengembangkan program-program inovatif. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menyebabkan lemahnya pengawasan, terbatasnya sumber daya pendukung, dan rendahnya responsivitas madrasah terhadap kebutuhan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai faktor

strategis yang mendukung keberhasilan implementasi MBS sekaligus menjadi modal sosial dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah (Khoiroh et al., 2025).

Temuan kajian ini menegaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS tidak hanya terbatas pada dukungan finansial sebagaimana dipahami secara tradisional, tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Melalui berbagai peran tersebut, masyarakat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat tata kelola madrasah yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di era modern (Analisna et al., 2024).

Kontribusi Partisipasi Masyarakat sebagai Katalisator dalam Meningkatkan Kinerja Madrasah di Era Pendidikan Modern

Hasil kajian berbagai literatur menunjukkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja madrasah dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks pendidikan modern, kinerja madrasah

tidak lagi diukur semata-mata dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya secara efektif, membangun budaya mutu, menciptakan inovasi, serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi modal sosial yang penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan madrasah dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks (Machali et al., n.d.).

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja madrasah melalui penguatan tata kelola lembaga. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan mendorong terciptanya pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan. Dalam perspektif MBS, keterlibatan pemangku kepentingan memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih demokratis sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan dan dukungan yang lebih tinggi dari masyarakat. Kondisi

tersebut berdampak meningkatnya efektivitas implementasi program-program pendidikan di madrasah (Aziz, 2015). Kontribusi lain yang menonjol adalah meningkatnya dukungan sumber daya bagi pengembangan madrasah. Literatur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berbentuk bantuan finansial, tetapi juga meliputi dukungan pemikiran, tenaga, keahlian, jaringan kerja sama, dan akses terhadap berbagai sumber belajar. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sumber daya tersebut membantu madrasah mengatasi keterbatasan yang sering dihadapi dalam pengembangan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, maupun pelaksanaan program pembelajaran yang inovatif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengungkit (*enabler*) yang memperkuat kapasitas madrasah dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan (Muhadi et al., 2021).

Di era pendidikan modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat juga berperan dalam mendorong inovasi

kelembagaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kemitraan antara madrasah dan masyarakat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan program pendidikan berbasis teknologi, literasi digital, pendidikan karakter, serta penguatan kompetensi abad ke-21. Keterlibatan orang tua, alumni, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui berbagai kegiatan pendampingan, pelatihan, maupun program kemitraan yang mendukung pengembangan kompetensi (Magdalena, 2016). Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi pendukung eksternal, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membantu madrasah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, partisipasi masyarakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun kepercayaan publik terhadap madrasah. Kepercayaan masyarakat merupakan aset penting bagi keberlangsungan lembaga pendidikan karena berkaitan dengan legitimasi sosial, dukungan sumber daya, dan keberlanjutan program pendidikan. Madrasah yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan pendidikan

cenderung memperoleh tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan lembaga yang menerapkan pengelolaan tertutup. Tingginya kepercayaan publik berdampak pada meningkatnya dukungan sosial, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, serta partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan madrasah (Analisna et al., 2024).

Dari perspektif kinerja organisasi, partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan produktivitas madrasah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi membantu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi kontrol sosial dilakukan masyarakat mendorong pengelola madrasah untuk bekerja secara lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada mutu dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), yang merupakan karakteristik penting lembaga pendidikan yang berkinerja tinggi (Khoiroh et al., 2025).

Dalam perspektif pendidikan Islam, kontribusi partisipasi masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah), *ta'awun* (kerja sama), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab bersama). Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggung jawab madrasah, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah tidak hanya memiliki dimensi manajerial, tetapi mengandung dimensi sosial dan moral memperkuat keberlanjutan pengembangan pendidikan Islam (Salehoddin & Rony, 2022).

Berdasarkan hasil kajian literatur, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai katalisator dalam meningkatkan kinerja madrasah karena mempercepat peningkatan mutu melalui penguatan tata kelola, sumber daya, pengembangan inovasi, peningkatan akuntabilitas, serta pembangunan kepercayaan publik. Semakin tinggi kualitas partisipasi masyarakat, semakin besar peluang madrasah untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan efektif, adaptif, dan kompetitif di era pendidikan modern (Handoyo et al., 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi MBS pada Madrasah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada madrasah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Partisipasi masyarakat tidak muncul secara otomatis, melainkan dibentuk oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, serta pola hubungan yang terjalin antara madrasah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBS sangat ditentukan oleh kemampuan madrasah dalam menciptakan iklim yang mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat dukungan lingkungan sosial terhadap madrasah, semakin besar peluang terwujudnya tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Analisna et al., 2024).

Salah satu faktor pendukung utama adalah kepemimpinan kepala madrasah yang terbuka dan

kolaboratif. Kepala madrasah yang menerapkan pola komunikasi partisipatif cenderung lebih mampu membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong keterlibatan orang tua dan komite madrasah dalam berbagai program pendidikan (Ajefri, n.d.). Selain itu, komunikasi yang efektif antara madrasah dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun kemitraan yang produktif. Ketika informasi mengenai program, kebutuhan, dan capaian madrasah disampaikan secara transparan, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kemajuan lembaga pendidikan (Machali et al., n.d.). Penelitian implementasi MBS menunjukkan bahwa kepemimpinan, komunikasi yang efektif, serta kapasitas komite sekolah merupakan faktor penting yang mendukung tingginya partisipasi masyarakat (Nurokhim, 2017).

Faktor pendukung lainnya adalah tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat pendidikan cenderung menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung

program madrasah (Analisna et al., 2024). Kesadaran tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam musyawarah, dukungan terhadap kegiatan pembelajaran, pengawasan program sekolah, maupun kontribusi sumber daya sesuai kemampuan masing-masing. Di samping itu, budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang masih kuat di lingkungan masyarakat menjadi modal sosial yang berharga dalam mendukung implementasi MBS.

Semangat kebersamaan tersebut memungkinkan masyarakat memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga tenaga, pemikiran, dan jaringan sosial yang bermanfaat bagi pengembangan madrasah (Handoyo et al., 2021). Dari sisi kelembagaan, keberadaan komite madrasah yang aktif dan profesional juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Komite madrasah yang memiliki struktur organisasi yang jelas, kapasitas anggota yang memadai, serta hubungan kerja yang harmonis dengan pihak madrasah mampu menjalankan fungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator secara optimal. Penelitian mengenai partisipasi komite sekolah

menunjukkan bahwa peran organisasi komite merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS (Magdalena, 2016). Di sisi lain, hasil kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS. Salah satu hambatan yang paling sering ditemukan adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep MBS dan fungsi komite madrasah (Analisna et al., 2024). Banyak masyarakat yang masih memandang keterlibatan mereka sebatas pemberian bantuan dana, sehingga belum berpartisipasi secara substantif dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi program pendidikan (Magdalena, 2016). Selain itu, terdapat pula sebagian pengelola madrasah yang belum sepenuhnya memahami batas dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pendidikan sehingga ruang partisipasi yang tersedia menjadi terbatas (Aziz, 2015).

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah sering kali membatasi kemampuan mereka untuk

terlibat secara aktif dalam kegiatan madrasah (Akhyar, 2024). Selain keterbatasan finansial, kesibukan pekerjaan dan tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan sebagian orang tua memiliki waktu yang terbatas untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan madrasah (Akhyar, 2024). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut memengaruhi kualitas partisipasi yang diberikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang percaya diri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan (Akhyar, 2024).

Hambatan lainnya adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi antara madrasah dengan masyarakat (Machali et al., n.d.). Kurangnya forum dialog yang berkelanjutan dapat menyebabkan kesalahpahaman, rendahnya kepercayaan, dan minimnya rasa memiliki terhadap program-program madrasah. Di beberapa kasus, komite madrasah bahkan hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif tanpa memiliki peran yang nyata dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan prinsip

partisipasi yang menjadi ruh MBS tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, berkembangnya pola hidup individualistik dalam masyarakat modern juga menjadi tantangan tersendiri karena dapat mengurangi kepedulian terhadap kepentingan pendidikan yang bersifat kolektif.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, dapat dipahami bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS pada madrasah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada. Kepemimpinan yang partisipatif, komunikasi yang efektif, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, budaya gotong royong, dan keberadaan komite madrasah yang aktif merupakan faktor-faktor yang dapat memperkuat keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya pemahaman tentang MBS, keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, lemahnya komunikasi, dan minimnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, upaya penguatan partisipasi masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan madrasah dan komite,

pengembangan komunikasi yang lebih inklusif, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan secara optimal dalam mewujudkan tata kelola madrasah yang efektif dan berkualitas (Nurokhim, 2017).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji partisipasi masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dari aspek implementasi, peran komite sekolah atau madrasah, serta pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebagian besar penelitian melalui pendekatan studi lapangan pada satuan pendidikan tertentu sehingga menghasilkan temuan yang bersifat kontekstual dan terbatas pada kondisi lokal masing-masing lembaga. Selain itu, kajian sebelumnya lebih banyak menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan MBS tanpa menguraikan komprehensif partisipasi berfungsi sebagai faktor penggerak utama peningkatan kinerja madrasah. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi hubungan partisipasi masyarakat, implementasi MBS, dan kinerja madrasah melalui pendekatan studi kepustakaan bersifat integratif.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk dan peran partisipasi masyarakat, tetapi juga menganalisis partisipasi masyarakat sebagai katalisator yang mempercepat peningkatan kinerja madrasah melalui penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, pengembangan inovasi, penguatan modal sosial, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih aktual dengan menempatkan partisipasi masyarakat dalam konteks era pendidikan modern, yang ditandai oleh transformasi digital, tuntutan transparansi, penguatan kolaborasi multipihak, dan kebutuhan peningkatan daya saing lembaga pendidikan. Melalui sintesis berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, kajian ini menghasilkan kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan eksternal terhadap madrasah, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong efektivitas organisasi, keberlanjutan program pendidikan, dan peningkatan kinerja madrasah secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, disimpulkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada madrasah. Partisipasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai dukungan finansial, tetapi mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam perspektif MBS, masyarakat berperan sebagai mitra strategis madrasah yang berkontribusi dalam penguatan tata kelola pendidikan melalui fungsi pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*mediating agency*). Keterlibatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan musyawarah, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja madrasah. Keterlibatan masyarakat mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan lembaga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperluas dukungan sumber daya, mendorong inovasi pendidikan, serta membangun kepercayaan publik terhadap madrasah. Di era pendidikan modern ditandai oleh perkembangan teknologi, tuntutan mutu, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pendidikan, partisipasi masyarakat menjadi modal sosial penting dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan pengembangan madrasah. Sebaliknya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang MBS, keterbatasan ekonomi, lemahnya komunikasi, dan belum optimalnya fungsi komite madrasah masih menjadi faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat implementasi MBS.

Kajian ini memiliki nilai kebaruan pada perspektif analisis yang menempatkan partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai unsur pendukung implementasi MBS, tetapi sebagai katalisator peningkatan kinerja madrasah. Melalui pendekatan studi kepustakaan yang integratif, penelitian ini berhasil mengonstruksi hubungan konseptual antara partisipasi masyarakat, tata kelola

berbasis sekolah, dan kinerja madrasah dalam konteks pendidikan modern. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi kualitas partisipasi masyarakat, semakin besar peluang madrasah untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, inovatif, akuntabel, dan berorientasi peningkatan mutu berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kemitraan antara madrasah dan masyarakat perlu menjadi agenda strategis dalam pengembangan pendidikan Islam agar madrasah mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husain. (n.d.). *Manajemen Berbasis Madrasah*. Retrieved May 7, 2026, from <https://ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/arti cle/view/90/67>
- Aini, M. (2022). Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 95–106. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1122>
- Ajefri, F. (n.d.). *EFEKTIFITAS KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH*.
- Akhyar, Y. (2024). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam

- Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta. *Journal of Education Research*, 5(1), 711–717.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.917>
- Analisa, A., Sulistiani, S., & Yasin, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(01), 01–12.
<https://doi.org/10.71382/aa.v1i01.67>
- Aziz, A. Z. (2015). MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: ALTERNATIF PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH. *El-Tarbawi*, 8(1), 69–92.
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.v0i8.iss1.art5>
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 321–332.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855>
- Haramain, M. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*.
- Jemani, A. (2020). Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam Berbasis Total Quality Management Di Era Disrupsi. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 13(2), 158–188.
<https://doi.org/10.37812/fikroh.v13i2.112>
- Khoiroh, U., Arifin, M., & Iman, D. Z. (2025). Integrasi Nilai Islam dan Total Quality Management: Model Pendekatan Mutu Berbasis Spiritualitas untuk Optimalisasi Pendidikan Islam. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 79–86.
<https://doi.org/10.64540/v2mrpr82>
- Langeningtias, U., Putra, A. M., & Nurwachidah, U. (2021). Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(7), 1269–1282.
<https://doi.org/10.36418/japendi.v2i7.236>
- Machali, D. I., Pd, M., & Hamid, D. H. N. (n.d.). *PENGANTAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*.
- Magdalena. (2016). *PERAN-KOMITE-MADRASAH-DALAM-MENINGKATKAN-MUTU-PENDIDIKAN-DI-MADRASAH-ALIYAH-NEGERI-CURUP. STAIN CURUP*.
- Muhadi, I., Giyoto, G., & Untari, L. (2021). Tata Kelola Stakeholder dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 256–265.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2209>
- Nurokhim, N. (2017). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Kependidikan*, 5(2), 247–260.
<https://doi.org/10.24090/jk.v5i2.1925>
- Salehoddin, M., & Rony. (2022). Mengentas Mutu Madrasah Menuju Madrasah Berkualitas. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 7(2), 125–

142.

<https://doi.org/10.15642/joies.202>

2.7.2.95-115

Zainuri, M. (2013). INTEGRASI AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM PENDIDIKAN BERBASIS KESADARAN SOSIAL. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 371–392.
<https://doi.org/10.21274/epis.201>
3.8.2.371-392